Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

IMPLEMENTASI PROGRAM NOL KEMISKINAN EKSTREM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KOTA BONTANG

Suthiar,[1)] Dafyar Eliadi Hardian,[2)] Edi Mulyadi[3)]

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf

2407010126@students.unis.ac.id[1)]
Dafyar711@unis.ac.id[2)]
Edi.mulyadi@unis.ac.id[3)]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Nol Kemiskinan Ekstrem dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bontang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah. Hasil penelitian berdasarkan kerangka teori George C. Edward III menunjukkan bahwa variabel komunikasi berjalan terstruktur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), ketersediaan sumber daya didukung alokasi anggaran daerah serta kemitraan kolaboratif dengan BAZNAS dan YBM-LAZ PLN, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan responsivitas yang kuat, serta struktur birokrasi telah didukung oleh standar operasional prosedur yang terarah lintas sektor. Secara umum, implementasi program ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Bontang. Disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat integrasi data, optimalisasi anggaran operasional, dan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kemiskinan Ekstrem; Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Extreme Poverty Eradication Program in improving community welfare at the Social Affairs Office of Bontang City. The research method uses a qualitative descriptive phenomenological approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, field observations, and documentation studies of local policies. The results based on George C. Edward III's policy framework indicate that the communication variable runs structurally through the Regional Poverty Reduction Coordination Team (TKPKD), resource availability is supported by local budget allocation and collaborative partnerships with BAZNAS and YBM-LAZ PLN, implementers' disposition shows strong commitment and responsiveness, and the bureaucratic structure is backed by well-directed cross-sectoral standard operating procedures. Overall, the implementation reflects collaborative efforts of the local government to accelerate the handling of extreme poverty in Bontang City. It is recommended that the local government continuously strengthen data integration, optimize operational budgets, and ensure the sustainability of community empowerment programs.

Keywords: *Community Welfare; Extreme Poverty; Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang terus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kondisi kemiskinan tidak hanya menggambarkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan nasional. Untuk mengukur tingkat kemiskinan secara lebih objektif, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan Basic Needs Approach (BNA). Pendekatan ini menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan. Seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin apabila tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum di wilayah masing-masing. Dengan pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Selain kemiskinan secara umum, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang berada pada kondisi paling rentan, yaitu kelompok miskin ekstrem. Kelompok ini tidak hanya mengalami keterbatasan ekonomi, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Identifikasi kemiskinan ekstrem di Indonesia menggunakan dua acuan utama, yaitu standar Bank Dunia sebesar US$2,15 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari serta standar nasional berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2025 yang menetapkan batas pengeluaran sebesar Rp10.739 per orang per hari. Di tingkat daerah, penetapan status rumah tangga miskin juga merujuk pada kebijakan pemerintah daerah, termasuk melalui Surat Keputusan Wali Kota mengenai garis kemiskinan yang berlaku di wilayah tersebut.

Komitmen pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui integrasi berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pendataan kelompok sasaran. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pendekatan by name by address (BNBA) agar intervensi program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terukur.

Sebagai penguatan kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini mengatur penggunaan berbagai sumber data kesejahteraan sosial yang terintegrasi sebagai dasar penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta basis data pendukung lainnya. Kebijakan nasional tersebut kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi wilayah masing-masing.

Salah satu daerah di Kalimantan Timur yang aktif menjalankan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Kota Bontang. Kota ini memiliki karakteristik

sebagai kota industri yang pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh aktivitas sektor petrokimia, energi, dan industri pengolahan. Karakteristik kota industri membawa konsekuensi sosial ekonomi khusus, seperti tingginya biaya hidup, ketimpangan pendapatan, serta ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bontang, tingkat kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,74 persen. Untuk mempercepat penanganan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bontang menetapkan kebijakan daerah melalui Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/229/BAPPERIDA/2025 tentang Penetapan Kota Bontang sebagai Kota Zero Miskin Ekstrem Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan Program 100 Hari Nol Kemiskinan Ekstrem.

Meskipun angka kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan, beberapa permasalahan struktural masih memengaruhi kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Bontang. Sebagian besar rumah tangga miskin ekstrem masih bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap, rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja lokal, ketidakmerataan manfaat pertumbuhan ekonomi industri, serta kerentanan kelompok near poor terhadap guncangan ekonomi. Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial Kota Bontang memiliki peran strategis sebagai leading sector dalam pelaksanaan program. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Program Nol Kemiskinan Ekstrem di Dinas Sosial Kota Bontang dianalisis dari empat faktor utama teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna memberikan gambaran komprehensif bagi perbaikan kebijakan sosial daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif fenomenologis guna mengeksplorasi secara mendalam proses pelaksanaan Program Pengentasan Nol Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Sosial Kota Bontang. Fokus analisis dalam penelitian ini ditekankan pada pemahaman, pengalaman, serta penafsiran para aktor pelaksana kebijakan terhadap dinamika operasional di lapangan. Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua entitas, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari informan lapangan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen kebijakan resmi. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan kedalaman data sosial yang dihimpun.

Kategori informan primer dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tingkatan subjek, yaitu informan utama yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bontang selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), informan kunci yaitu Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bontang, serta informan pendukung yang meliputi Ketua BAZNAS Kota Bontang, Ketua LAZ YBM PLN Bontang, dan masyarakat penerima manfaat program. Data sekunder sebagai bahan pendukung mencakup Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022, serta SK Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/229/BAPPERIDA/2025 tentang Penetapan Kota Bontang sebagai Kota Zero Miskin Ekstrem.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terpadu melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur, observasi lapangan terhadap proses validasi dan pelayanan sosial, serta studi dokumentasi arsip resmi. Prosedur analisis data naskah ini menerapkan model analisis kualitatif

yang mengalir secara interaktif, yang meliputi reduksi data hasil lapangan, penyajian data secara tematis naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian kredibilitas dan keabsahan data ilmiah dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, di mana data dari informan utama dikonfrontasikan secara silang dengan keterangan informan kunci, informan pendukung, serta dokumen kebijakan tertulis hingga mencapai titik kejenuhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan Program Nol Kemiskinan Ekstrem

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi Program Nol Kemiskinan Ekstrem di Kota Bontang berjalan melalui alur penyampaian informasi yang terstruktur, berjenjang, dan berlapis. Proses transmisi kebijakan pada level strategis dilakukan secara formal melalui forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh pimpinan daerah. Pada level teknis operasional, arahan kebijakan tersebut ditransmisikan oleh pimpinan Dinas Sosial kepada staf dan petugas pendamping lapangan melalui briefing rutin dan pembekalan juknis. Guna meminimalkan distorsi pesan kebijakan di tingkat birokrasi, Pemerintah Kota Bontang menerapkan prinsip satu data dan satu narasi. Di tingkat akar rumput, penyampaian informasi dilakukan secara personal melalui kunjungan langsung (jemput bola) oleh petugas sosial dan kelurahan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mempermudah masyarakat sasaran memahami hak serta kewajibannya.

Analisis mendalam terhadap alur komunikasi ini menunjukkan keselarasan dengan kerangka implementasi George C. Edward III yang menekankan bahwa transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan merupakan variabel penting penentu keberhasilan kebijakan. Kejelasan informasi di Dinas Sosial Kota Bontang terjaga karena adanya dokumen hukum formal seperti Surat Keputusan Wali Kota yang mempertegas batas wewenang. Konsistensi narasi kebijakan dari tingkat pusat hingga ke daerah juga tepercaya karena mengacu pada Instruksi Presiden terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional. Komunikasi lintas sektor yang dilembagakan melalui TKPKD terbukti efektif dalam menyatukan gerak berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga mitra non-pemerintah seperti BAZNAS dan YBM-LAZ PLN. Pola komunikasi dua arah ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran administratif, melainkan bekerja sebagai instrumen integrasi program yang mampu menyamakan persepsi, mengikat komitmen kolektif, dan mempercepat respons penanganan keluhan masyarakat di lapangan.

Kapasitas dan Sinergi Sumber Daya

Dimensi sumber daya memegang peranan yang sangat vital dalam mentransformasikan konsep kebijakan menjadi tindakan sosial yang nyata. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta data terpadu di Dinas Sosial Kota Bontang telah memadai untuk menggerakkan program, meskipun masih menghadapi ruang penguatan dalam aspek operasional lapangan. Secara administratif, staf Dinas Sosial memiliki kompetensi yang kuat dalam hal verifikasi data. Namun, beban kerja pendampingan langsung secara berulang di lapangan dinilai sangat menyerap energi sosial, karena kelompok miskin ekstrem yang tersisa merupakan kelompok residual yang memiliki kompleksitas kerentanan berlapis. Pada aspek sarana prasarana, fasilitas sistem pengolah data kantor berfungsi optimal, namun pelaksana masih menghadapi

kendala teknis mobilitas dan jaringan internet di wilayah pesisir atau pulau tertentu saat melakukan validasi geospasial.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran fiskal daerah dan kapasitas operasional personel pemerintah, Dinas Sosial Kota Bontang menerapkan strategi collaborative governance dengan memobilisasi sumber daya dari lembaga filantropi. Sinergi sumber daya ini terwujud secara nyata melalui integrasi data kemiskinan dengan basis data eksternal yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bontang dan YBM-LAZ PLN. Lembaga mitra non-pemerintah ini tidak hanya memberikan dukungan pembiayaan tambahan di luar dana APBD, melainkan juga menerjunkan relawan lapangan yang lincah dan fleksibel dalam pendampingan transformasional. Pendekatan penggabungan aset ini membuat keterbatasan logistik birokrasi dapat ditutupi oleh elastisitas gerak mitra sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai kompas utama penargetan sasaran, yang divalidasi secara berulang lewat musyawarah kelurahan guna mencegah terjadinya kesalahan inklusi maupun eksklusi bantuan, sehingga pemanfaatan anggaran daerah tetap berada dalam koridor efisiensi dan ketepatan sasaran.

Disposisi dan Orientasi Nilai Pelaksana

Faktor disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana naskah ini menunjukkan indikator yang sangat positif dan proaktif di seluruh tingkatan aktor kebijakan Kota Bontang. Komitmen kelembagaan dibangun secara kuat dari level pimpinan daerah yang memposisikan program pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai indikator kinerja utama daerah yang bersifat lintas instansi. Di tingkat operasional, komitmen tersebut terinternalisasi menjadi tanggung jawab moral, di mana petugas pendamping lapangan bersedia bekerja melampaui jam kerja formal demi merespons kondisi darurat warga rentan. Sikap responsif ini dikombinasikan dengan pendekatan pelayanan yang humanis dan empatik saat melakukan kunjungan rumah, sehingga mampu menurunkan ketegangan psikologis masyarakat miskin ekstrem dan meningkatkan keterbukaan mereka dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi.

Selain komitmen dan responsivitas, dimensi integritas dan kejujuran menjadi pilar moral yang menjaga legitimasi pelaksanaan program di mata publik. Transparansi penyaluran bantuan sosial dijamin melalui penerapan sistem verifikasi berbasis data faktual lapangan, bukan atas dasar preferensi subjektif atau kedekatan personal pelaksana. Ruang diskresi pelaksana dibatasi secara proporsional oleh sistem kontrol administratif, sementara ruang partisipasi masyarakat dibuka lebar melalui penyediaan kanal pengaduan keluhan di tingkat kelurahan. Lembaga mitra seperti BAZNAS dan YBM PLN juga menerapkan standar akuntabilitas tata kelola keuangan zakat yang ketat dalam intervensi bersama ini. Sikap jujur, adil, dan terbuka yang ditunjukkan oleh aparatur sosial terbukti membangun kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi dari masyarakat penerima manfaat, yang menjadi modal sosial penting bagi kelancaran pelaksanaan tahapan program pemberdayaan ekonomi lanjutan.

Struktur Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Hasil penelitian menegaskan bahwa dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Nol Kemiskinan Ekstrem di Kota Bontang telah dikonsolidasikan ke dalam sistem tata kelola kolaboratif yang terarah. Standard Operasional Procedure (SOP) telah dibakukan sebagai pedoman teknis operasional yang mengatur alur kerja mulai dari pendataan awal, verifikasi faktual, pleno kelurahan, hingga eksekusi paket intervensi lintas sektor. Pembagian tugas diatur

secara fungsional melalui keputusan formal pembentukan TKPKD, di mana Dinas Sosial bertindak sebagai leading sector yang mengendalikan data dan koordinasi, sementara instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketenagakerjaan memberikan dukungan program secara spesifik sesuai mandat kelembagaan mereka. Di tingkat lapangan, aparatur pemerintah kelurahan bertindak sebagai simpul penghubung awal yang mempercepat aliran informasi kebutuhan warga.

Meskipun pada fase awal program sempat muncul potensi tumpang tindih regulasi akibat kemiripan karakteristik program jaminan sosial yang ada, struktur birokrasi di Kota Bontang memiliki mekanisme korektif yang responsif. Melalui rapat koordinasi berkala di dalam wadah TKPKD, overlap peran tersebut dapat segera diselaraskan dengan mempertegas batas kontribusi masing-masing lembaga. Sistem pengawasan dijalankan secara berlapis melalui monitoring administratif berbasis laporan berkala dan monitoring substantif berupa evaluasi dampak pasca-intervensi bantuan. Struktur birokrasi kolaboratif ini dinilai berhasil mengubah pola pelayanan yang kaku menjadi lebih adaptif, serta menggeser model intervensi tunggal yang tidak berkelanjutan menjadi paket intervensi multidimensi terpadu yang efektif mengawal pencapaian target zero miskin ekstrem.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Nol Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Sosial Kota Bontang secara umum telah berjalan dengan sangat efektif dan sistematis berdasarkan analisis empat dimensi teori George C. Edward III. Keberhasilan ini ditopang oleh alur komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten melalui forum TKPKD, pola mobilisasi sumber daya kolaboratif yang berhasil menggabungkan kapasitas fiskal pemerintah dengan elastisitas pembiayaan lembaga mitra (BAZNAS dan YBM-LAZ PLN), tingginya komitmen dan integritas moral pelaksana lapangan yang mengedepankan pendekatan humanis, serta dukungan struktur birokrasi yang terintegrasi lintas sektor melalui pembakuan SOP operasional yang adaptif. Sinergi multipihak ini terbukti mampu menekan angka kerentanan sosial ekonomi masyarakat miskin ekstrem secara terukur melalui paket intervensi jaminan sosial dan pemberdayaan yang tepat sasaran.

Guna menjamin keberlanjutan capaian zero miskin ekstrem di Kota Bontang, disarankan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial untuk membangun sistem informasi data kemiskinan yang terintegrasi secara real-time lintas instansi guna mempercepat koordinasi operasional. Dinas Sosial perlu mengalokasikan anggaran operasional logistik yang lebih memadai khusus bagi penguatan kapasitas pendampingan lapangan yang bersifat transformasional. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan meningkatkan peran aktifnya sebagai sensor sosial di tingkat komunitas lokal dalam memperbarui data kependudukan secara partisipatif. Lembaga mitra dan dunia usaha melalui program CSR disarankan untuk mengalihkan fokus intervensi dari jaminan konsumtif jangka pendek menuju program inkubasi kemandirian ekonomi produktif bagi keluarga rentan, serta peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini menggunakan studi komparatif kuantitatif terkait indeks dampak kesejahteraan sosial jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Adibowo, R., et al. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung. JIPSi, XV(1), 45-58.

Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik. Jurnal Politik Profetik, 4(1), 20-35.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.

Bhakti, A. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tingkat Lokal. Jurnal Administrasi Sosial, 10(2), 112-125.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. World Bank Publications, Washington DC.

Darussalam, et al. (2015). Dilema Tax Holiday. Danny Darussalam Tax Centre, 34(September), 89-104.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe, New York.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington DC.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press, Washington DC.

Faridz, F. A., et al. (2024). Pembangunan Manusia dan Tingkat Tenaga Kerja. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(6), 1-22.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press, New Jersey.

Harahap, M. (2023). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Medan. Journal Economy and Currency Study (JECS), 5(2), 85-94. https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1535.

Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. SAGE Publications, London.

Hutagalung, S. (2022). Koordinasi dan Transmisi Kebijakan Sosial Kontemporer. Jurnal Tata Kelola Publik, 14(3), 201-215.

Hutauruk, M. (2023). Kolaborasi Antarinstansi dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Administrasi Sektor Publik, 11(1), 45-60.

Irmayani, & Suradi. (2018). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 8(1), 1-13.

Janitra, R., et al. (2024). Validasi Berlapis dan Pemutakhiran Basis Data Kemiskinan Daerah. Jurnal Kebijakan Sosial, 16(1), 78-92.

Kiat, L. (2025). Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Maluku. Jurnal Sosiologi Pemerintahan, 12(2), 134-149.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation, New York.

Marliani, L., et al. (2025). Paradigma Administrasi Publik Dalam Teori Dan Praktek. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 542-549. https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/20864/pdf.

Molo, M. (2024). Kemiskinan: Konsep, Pengukuran Dan Kebijakan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1), 55-67.

O'Toole, L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 263-288.

Palumpun, A. S. (2024). Proses Pengembangan Inovasi By Need pada Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM). Bappeda Kota Malang, Malang.

Patmawati, A. K. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar. IAIN Parepare Repository. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5846/.

Puspitasari, P., et al. (2023). Implementasi Program BSPS Sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kemuning. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20), 639-650. https://doi.org/10.5281/zenodo.8435231.

Rahmawati, M. (2020). Pengertian Administrasi Kurikulum. Drs. Darmanto, M.Ed. (Ed.), Makassar, 1-41.

Saleh, H. (2025). Sinergi Sektor Publik untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensi. Jurnal Manajemen Publik, 13(1), 89-103.

Siraj, M. (2024). Komunikasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Makassar. Jurnal Komunikasi Birokrasi, 11(2), 140-155.

Taofik, M. (2026). Penerapan Model George C. Edward III pada Sektor Sosial dan Infrastruktur Daerah. Jurnal Publik Utama, 18(1), 12-29.

Ulum, M., et al. (2024). Integrasi Basis Data Kesejahteraan Sosial Regional. Jurnal Analisis Kebijakan, 15(3), 210-224.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-588.

Walikota Bontang. (2025). Keputusan Walikota Bontang Tentang Penetapan Kota Bontang Sebagai Kota Zero Miskin Ekstrem (NOMOR 100.3.3.3/229/BAPPERIDA/2025). Bapperida Kota Bontang, Bontang.

Widyaningsih, D., et al. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 31(2), 21-42. https://doi.org/10.55981/jep.

Winter, S. C. (2003). Implementation. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Handbook of Public Administration. SAGE Publications, London, 205-222.